



LAKIP DINAS PERIKANAN 2024

**KABUPATEN
KEPULAUAN
SELAYAR**

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan fungsi LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para stakeholders maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya. Selanjutnya guna memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam LAKIP juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa-masa berikutnya guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2021 - 2026.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas partisipasi, dukungan, dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP ini berguna bagi kita semua dan dapat memberi sumbangsih yang berarti bagi pembangunan bidang perikanan dan kelautan.



KEPALA DINAS

ANDRIANY GUSRAM, S.Pi

NIP. 19810825 201001 2 029

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tengah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perikanan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LAKIP Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator kinerja sasaran menunjukkan selain keberhasilan juga memiliki kekurangan sebagai tantangan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, ditetapkan 2 tujuan Renstra Dinas dengan 2 indikator kinerja, dan 7 sasaran kinerja dengan 13 indikator kinerja. Dari 15 indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 14 indikator yang berhasil mencapai target dan 1 indikator yang belum mencapai target sasaran, sementara 1 indikator yang belum dapat diukur karena tidak tersedianya data.

Seiring dengan tuntutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, upaya perbaikan kinerja Dinas Perikanan akan terus dimaksimalkan di waktu mendatang melalui koordinasi dan kerjasama yang baik.


KEPALA DINAS

ANDRIANY GUSRAM, S.Pi
NIP. 19810825 201001 2 029

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
D. Isu-Isu Strategis.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Indikator Kinerja Utama.....	20
C. Rencana Kerja Tahunan.....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Pengukuran Kinerja.....	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Peikanan.....	37
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan	37
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	41
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program.....	51
3.3 Realisasi Keuangan	69
BAB IV. PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Tindak Lanjut.....	77
LAMPIRAN	78

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01. Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026	12
Tabel 02. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....	14
Tabel 03. Sasaran, dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	15
Tabel 04. Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....	17
Tabel 05. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	21
Tabel 06. Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Perikanan	28
Tabel 07. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Formulasi Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.....	30
Tabel 08. Sasaran Program, Indikator Kinerja, serta Formulasi Pengukuran Kinerja pada Dinas Perikanan.....	32
Tabel 09. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Formulasi Pengukuran Kinerja pada Dinas Perikanan.....	35
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan Berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Tahun 2024.....	36
Tabel 11. Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan Tahun 2024	37
Tabel 12. Pengukuran Capaian pada Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....	39
Tabel 13. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020- 2024.....	39
Tabel 14. Perbandingan Persentasi Distribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024.....	40
Tabel 15. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024.....	40
Tabel 16. Capaian Indikator pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024	43
Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	45
Tabel 18. Target dan Capaian Indikator Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2024	47
Tabel 19. Target dan Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tahun 2024	48

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 20.	Target dan Capaian Kinerja Nilai Tukar Tahun 2024.....	50
Tabel 21.	Capaian Persentasi Kinerja Dinas Perikanan Pertriwulan Tahun 2024.....	52
Tabel 22.	Target dan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.....	53
Tabel 23.	Capaian Persentasi Kinerja Keuangan Per Triwulan Tahun 2024.....	54
Tabel 24.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2023	55
Tabel 25.	Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Triwulan Tahun 2023.....	56
Tabel 26.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar	57
Tabel 27.	Data Produksi Perikanan Budidaya Pertriwulan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.....	60
Tabel 28.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	60
Tabel 29.	Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023	64
Tabel 30.	Capaian Indikator Persentasi Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya Dlm Kabupaten/Kota Terhadap Perundang-undangan	67
Tabel 31.	Realisasi Belanja APBD Dinas Perikanan Tahun 2023.....	69
Tabel 32.	Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	70

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 01. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	4
Gambar 02. Peta Sasaran Strategis Pelayanan Dinas Perikanan.....	13
Gambar 03. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Nilai IKM Tahun 2023 – 2024	44
Gambar 04. Diagram Perbandingan Antara Realisasi Indikator Nilai LAKIP Tahun 2023 – 2024	46
Gambar 05. Diagram Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tahun 2022 – 2024	49
Gambar 06. Diagram Perbandingan Antara Realisasi Nilai Tukar Tahun 2023 s.d 2024	50
Gambar 07. Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 – 2024	53
Gambar 08. Capaian Indikator Kinerja Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2023 – 2024	55
Gambar 09. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 - 2024.....	59
Gambar 10. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 - 2024.....	61
Gambar 11. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022 – 2024	65
Gambar 12. Diagram Perbandingan Capaian Indikator Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/Kota Terhadap Perundang-undangan Tahun 2023 sd 2024	68

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 01. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.....	79
Lampiran 02. Rencana Aksi Dinas Perikanan Tahun 2024.....	81
Lampiran 03. Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perikanan Tahun 2024.....	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas peran birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan tupoksinya, organisasi pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan birokrasi. Demikian pula perubahan dalam lingkungan global menuntut agar manajemen sektor publik dikelola berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Performance Management*.

Good Governance adalah strategi untuk menciptakan institusimasyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik sektor semakinterbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. *Good governance* tidak hanya terkait dengan efisiensi, tapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan kepentingan publik kepada stakeholdernya. Ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta digunakan sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Olehnya itu setiap unit organisasi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui LAKIP. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dilakukan melalui tahapan antara lain penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja adalah alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diberi amanah dalam menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan. Pembentukan Dinas Perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diikuti dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan. Dengan amanah tersebut, Dinas Perikanan secara periodik mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap amanat tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perikanan adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dinas kepada Bupati yang memberi mandat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi dinas untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Adapun penyusunan LAKIP ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

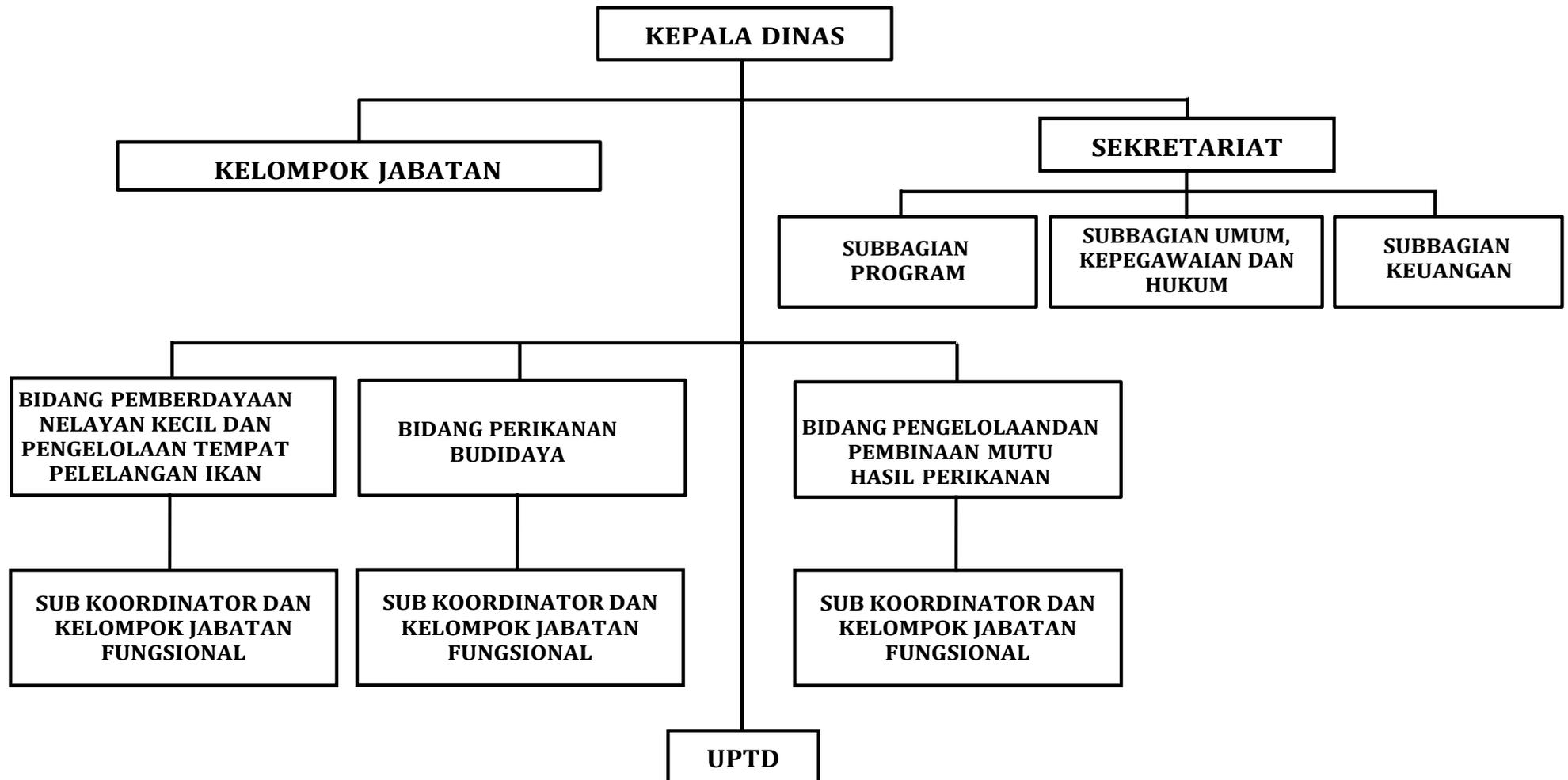
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar membentuk Dinas Perikanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedudukan Dinas Perikanan dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksana Pemerintah Daerah menurut bidangnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

GAMBAR 01.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kepala Dinas Perikanan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perikanan Kabupaten Selayar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas.;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, danevaluasi kebijakan teknis dibidang perikanan;
9. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis serta pelayanan administrasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil Negara lingkup dinas;
5. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan hukum
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui

Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

e. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu-Isu Strategis

Pembangunan saat ini telah menuntun masyarakat menjadi semakin kritis dalam menyikapi kinerja pelayanan pemerintah, sehingga setiap unit organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik lokal, regional maupun tingkat nasional. Memperhatikan perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun selalu ada isu-isu dan permasalahan yang kompleks, dan perlu disikapi oleh Pemerintahan secara lebih bijak dan terarah, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang ada, perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan komprehensif, sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Menyikapi isu–isu dan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama masalah Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan, perlu disikapi dengan mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, tantangan pelayanan Dinas Perikanan dalam pembangunan daerah tercermin dari isu strategis yang

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

dihadapi sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Peningkatan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Optimalisasi daya dukung lingkungan sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.
4. Pengembangan kualitas SDM (keterampilan, teknologi, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam).
5. Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan dan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.
6. Pengembangan dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur dan pengembangan fasilitas pada sentra pendaratan ikan.
7. Optimalisasi peran investasi swasta dalam industri bisnis perikanan.
8. Optimalisasi pengembangan usaha yang meliputi pengelolaan usaha, perlindungan dan pengembangan sumberdaya perikanan.
9. Optimalisasi program dan kegiatan budidaya ikan dalam penanganan penyakit ikan dan pengendalian lingkungan pada perikanan budidaya serta pemanfaatan lahan potensial.
10. Optimalisasi peran dan fungsi unit perbenihan (BBI dan UPR) dalam membangun sistem logistik perbenihan
11. Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sistem data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dan perikanan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan

Perencanaan kinerja suatu organisasi perangkat daerah diawali dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu kepada RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, merumuskan dan menetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program maupun kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Adapun penjabaran keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 diuraikan pada tabel di bawah ini.

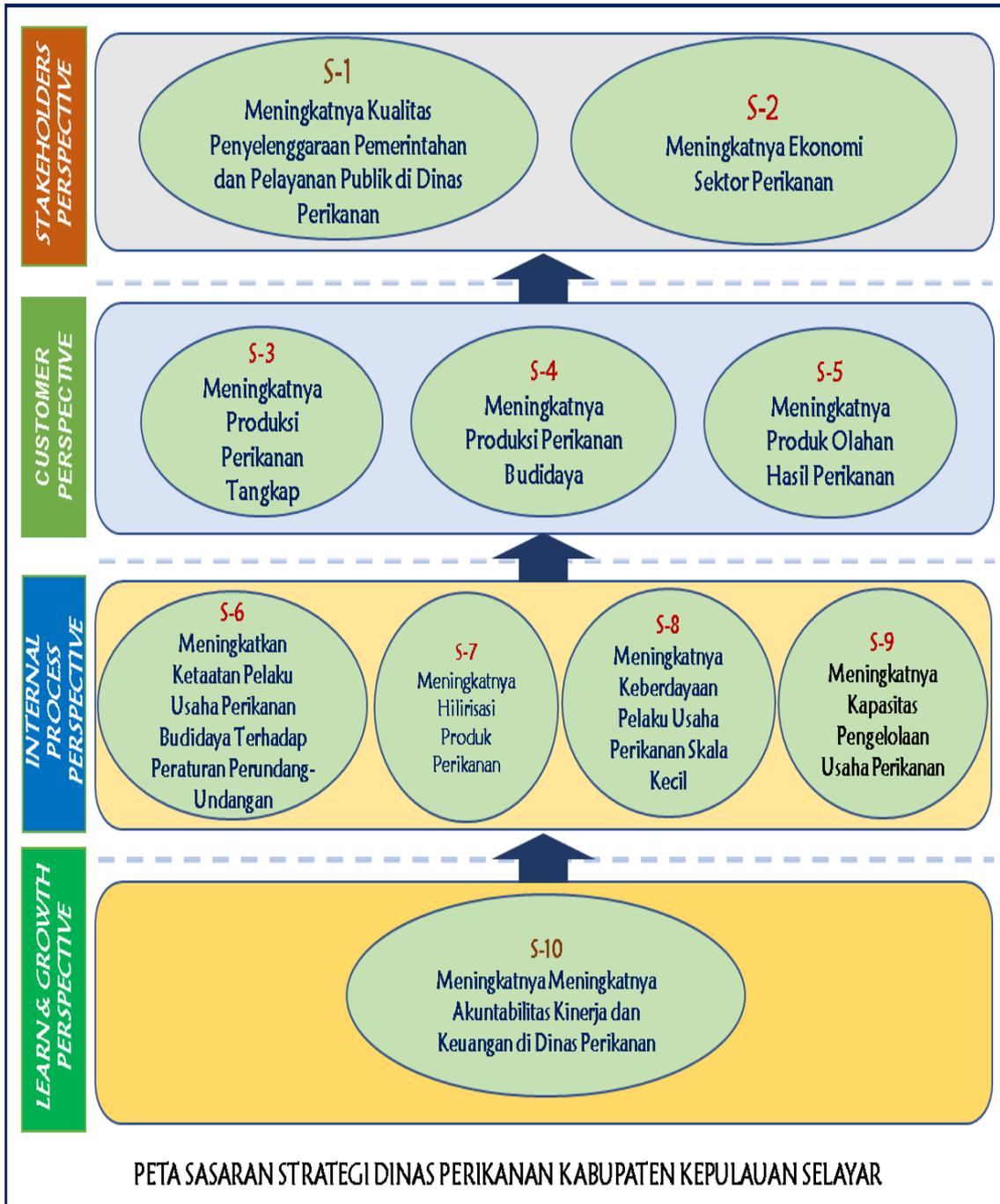
Tabel 01.
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan
Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026

RPJMD KAB. KEP. SELAYAR		RESNTRA DINAS PERIKANAN	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1)	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)
Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan			
Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-4)	Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)	Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Perikanan (T-2)	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam sasaran pelayanan Dinas Perikanan digambarkan dengan peta sasaran berdasarkan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni Stakeholders Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective, yang digambarkan berikut ini.

Gambar 02.

Peta Sasaran Strategis Pelayanan Dinas Perikanan



Adapun Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 02.

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Stakeholders Perspective							
Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	55,00	58,75	62,55	66,25	70,05
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (SS-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)	71,45 %	77 %	77,05 %	78 %	78,05 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	63,11	65,11	67,11	69,11	71,11
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)		Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. 1 M)	1.944,63	2.119,64	2.321,01	2.553,11	2.821,18
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan (Ton)	22.822,46	24.648,26	26.620,12	28.749,73	31.049,71
		Nilai Tukar :					
		- Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,00	101,25	101,50	101,75	101,75
		- Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101,00	101,25	101,50	101,75	101,75
		- Nilai Tukar Pengolah (NTPHP)	101,12	101,34	101,56	101,78	101,78

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 03.
Sasaran, dan Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan Kabupaten
Kepulauan Selayar

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Customer Perspective						
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S-3)	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.845,74	23.593,40	25.480,87	27.519,34	29.720,89
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,00	101,25	101,50	101,75	101,75
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S-4)	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	976,72	1.054,86	1.139,25	1.230,39	1.328,82
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101,00	101,25	101,50	101,75	101,75
Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S-5)	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	186,57	201,49	231,34	249,84	269,82
	Nilai Tukar Pengolah (NTPHP)	101,12	101,34	101,56	101,78	101,78
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (S-6)	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya Dalam Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5,27 %	10,54 %	15,81 %	21,07 %	26,34 %
Learning and Growth Perspective						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S-10)	Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan(%)	63,03 %	70,28 %	70,53 %	71,51 %	72,31 %
	Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%)	83 %	85 %	88 %	91 %	95 %

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Berdasarkan isu permasalahan dan tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perikanan, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dan Renstra perangkat daerah, maka Dinas Perikanan mewujudkan tujuan dan sasaran melalui Rencana Kerja Tahunan dengan 5 (lima) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan.

Program tersebut terdiri atas 1 (Satu) program generik yang bersifat dukungan dan layanan sekretariat dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 3 (Tiga) program teknis dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2024 terurai di bawah ini dan dapat dilihat pada table berikut ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 04.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)	Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	67,11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. /Kota : <u>Kegiatan :</u> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 85.686.600,-
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 3.194.010.800,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 21.876.000,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)	77,05%	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 281.264.300,- Rp. 39.000.000,- Rp. 385.734.400,- Rp. 196.625.500,-

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator		Target	Program/Kegiatan	Anggaran
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan (Ton) dan Nilai Tukar	Volume Produksi Perikanan Tangkap	25.480,87	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap <u>Kegiatan :</u> 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 39.259.800,-
			Nilai Tukar Nelayan	101,50		Rp. 1.367.587.500,-
		Volume Produksi Perikanan Budidaya	1.139,25	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya <u>Kegiatan :</u> 1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil 4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp. 5.275.000,-	
			Nilai Tukar Pembudidaya		101,50	Rp. 0,-
					Rp. 21.310.000,-	
					Rp. 150.015.200,-	

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
		Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	231,34	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan : <u>Kegiatan :</u> 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 22.952.700,- Rp. 7.450.000,- Rp. 1.524.530.000,-
		Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	101,56	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : <u>Kegiatan :</u> 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp. 2.725.000,-
		Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan	15,81		

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 2 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar di Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap Sasaran Strategis yang disusun dan ditetapkan memiliki tolak ukur yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target. Adapun dokumen penetapan kinerja yang dimaksud ditampilkan pada tabel 05. di bawah ini :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 05.
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Perikanan	%	77,05%	1. Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja
		Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	Skala Predikat	67,11		

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

		Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Skala Predikat	Sesuai	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
					3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

						3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
						4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
								2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

							<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya Lainnya
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.480,87	1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)		101,25			2.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

					3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.139,25		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)		101,50	1.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
					2.	Pemberdayaan PembudiDaya Ikan Kecil	1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					3.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

							1.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							2.	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
		Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	231,34		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikan 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah
		Nilai Tukar Pengolah (NTPHP)		101,50			1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil
							1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
							2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

		Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan	%	15,84	1.	<p>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</p>	1.	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
--	--	--	---	-------	----	--	----	---

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Formulasi Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Tabel 06.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Perikanan

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja secara periodik. Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam informasi kinerja atau evaluasi kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perikanan. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan dilakukan terhadap indikator kinerja pada sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sasaran strategis Dinas Perikanan merupakan penjabaran dari sasaran pada tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan penjabaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan, terdapat 2 (dua) tujuan dalam Renstra Dinas dengan 2 (dua) indikator kinerja, 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Adapula indikator capaian kinerja pada sasaran program, dimana terdapat 5 (lima) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Indikator kinerja pada sasaran strategis merupakan indikator untuk melihat kinerja pada level dampak (*impact*). Sedangkan indikator program merupakan indikator pada level hasil (*outcome*) dan indikator kegiatan adalah indikator pada level proses (*intermediate outcome/proces*).

Berikut ini uraian sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan serta indikatornya serta formulasi pengukuran kinerja masing-masing indikatornya.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 07.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Formulasi Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
	Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan			
Tujuan ke-1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1)	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (<i>Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020</i>)	Hasil Penilaian PMPRB oleh Inspektorat Kab. Kepulauan Selayar
	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (SS-1)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Dinas Perikanan	<p><u>Capaian IKM atas pelayanan SKPD :</u> <i>Interval Penilaian IKM (Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017) :</i> A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99</p>	Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	<p><u>Capaian Nilai LAKIP SKPD</u> <i>Kategorisasi Nilai LAKIP (PERMEN PAN DAN RB Nomor : 12 Tahun 2015) :</i> AA (Sangat Memuaskan) : >90-100, A (Memuaskan) : > 80-90, BB (Sangat Baik) : > 70-80, B (Baik) : > 60-70, CC (Cukup) : > 50-60, C (Kurang) : > 30-50, dan D (Sangat Kurang) : 0-30</p>	Hasil Penilaian LAKIP Dinas Perikanan oleh Inspektorat Daerah

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

			Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang telah berstandar SAP}}{\text{Total Laporan Keuangan SKPD}}$	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tujuan ke-2	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-5)	Mengoptimalkan pengelolaan potensiperikanan (T-2)	Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. 1 M)	Perhitungan PDRB SubSektor Perikanan Terhadap Total PDRB Kabupaten atas dasar harga berlaku	BPS Kab. Kepulauan Selayar
Sasaran Ke-2.	Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6)	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)	Volume Produksi Perikanan (Ton)	Total volume (produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya) pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Tangkap
			Nilai Tukar : - Nilai Tukar Nelayan (NTN) - Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) - Nilai Tukar Pengolah (NTPHP)	Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh nelayan/pembudidaya ikan (Ib) $NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$ Perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan $I_t = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{P_{it}}{P_{(t-1)i}} \cdot P_{(t-1)i} \cdot Q_{oi}}{\sum_{i=1}^n P_{oi} \cdot Q_{oi}} \times 100$ <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $\frac{P_{it}}{P_{(t-1)i}}$ = Rasio Harga (RH) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $P_{(t-1)i} \times Q_{oi} = DT_{i,t}$ "Diagram Timbang Bulan Sebelumnya" </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $P_{oi} \times Q_{oi} = DT_{i,0}$ "Diagram Timbang Tahun Dasar ke-0" </div> </div> $I_t = \frac{\sum DT \text{ Bulan Berjalan}}{\sum DT \text{ Tahun Dasar}}$	Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Budidaya BPS Provinsi Sulawesi Selatan Dirjen PDSKP KKP

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 08.

Sasaran Program, Indikator Kinerja, serta Formulasi Pengukuran Kinerja pada Dinas Perikanan Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Perikanan (S_10)	Capaian Kinerja Dinas Perikanan (%)	$\frac{\text{Jumlah realisasi Fisik Kegiatan tahun n}}{\text{Total Kegiatan Fisik yang dikelola tahun n}} \times 100 \%$	Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Akhir Tahun Dinas Perikanan
		Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan (%)	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran tahun n}}{\text{Total anggaran yang dikelola tahun n}} \times 100 \%$	Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perikanan
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S_3)	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Tangkap
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S_4)	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produksi Perikanan Budidaya
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$	BPS Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S_5)	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan hasil perikanan pada tahun n	Laporan Hasil Pendataan Produk Olahan Hasil Perikanan

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

		<p>Nilai Tukar Pengolah (NTPHP)</p>		<p>Dirjen PDSKP KKP</p>
5.	<p>Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU (S_6)</p>	<p>Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan</p>	<p>Jumlah Pembudidaya Perikanan yang telah mengikuti Ketentuan PerUndang2an Total Pembudidaya Ikan dalam Kabupaten/kota X 100 %</p>	<p>Laporan Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan</p>

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran secara periodik. Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Sasaran dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam informasi kinerja atau evaluasi kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perikanan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan atau evaluasi monitoring realisasi kegiatan dan keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja sebagai parameter pengukuran capaian pada 2 (dua) tujuan Renstra Dinas, dan 7 (tujuh) sasaran, yang terbagi atas 2 (dua) Sasaran Strategis, dan 5 (lima) Sasaran Program berdasarkan Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026.

Berikut ini uraian dan analisis capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan sarannya masing-masing :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 09.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan
Berdasarkan Tujuan, dan Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan		Skala Predikat	62,55	0	0
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1)	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan	%	77,05	80,24	104,14
		2.	Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)Dinas Perikanan	Skala Predikat	67,11	71	105,80
		3.	Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan StandarAkuntansi Pemerintah (SAP)		Sesuai	Sesuai	100
	Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)	Nilai PDRB Subsektor Perikanan		Rp. 1 M	2.321,01	1.987,68	85,64
2.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan (SS-2)	4.	Volume Produksi Perikanan	Ton	26.620,12	26.118,37	98,12
		5.	Nilai Tukar : - Nilai Tukar Nelayan (NTN) - Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) - Nilai Tukar Pengolah (NTPHP)		101,50 101,50 101,56	111,92 106,84 104,94	110,11 109,98 100,33

Catatan :

1. Nilai LAKIP menggunakan nilai LAKIP tahun 2023 (Sumber : Inspektorat Kab. Kepulauan Selayar)
2. Nilai PDRB Subsektor Perikanan menggunakan data tahun 2024 (Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar)
3. Data nilai tukar nelayan dan pembudidaya menggunakan data nilai tukar provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan);
4. Data nilai tukar pengolah menggunakan data nilai tukar Nasional tahun 2024 (Sumber : Dirjen PDSPKP KKP)

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 10.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan
Berdasarkan Sasaran Program Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S-10)	1.	Capaian Kinerja Dinas Perikanan	%	70,53	97,01	137,40
		2.	Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan	%	88	96,32	109,45
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S-3)	3.	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.480,87	25.610,40	100,51
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)		101,50	111,92	110,27
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S-4)	4.	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.139,25	507,97	44,59
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)		101,50	106,84	105,26
4.	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S-5)	5.	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	231,34	247,998	107,20
			Nilai Tukar Pengolah (NTPHP)		101,56	104,67	103,06
5.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (S-6)	6.	Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan	%	15,81	15,84	100,19

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi kedalam 2 (dua) tujuan yakni :

1. Tujuan (T-1) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan;
2. Tujuan (T-2) yaitu Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Perikanan;

Berikut ini analisis masing-masing Tujuan Dinas Perikanan:

1. Tujuan (1) : Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perikanan (T-1)

Tujuan mewujudkan reformasi birokrasi di Dinas Perikanan diukur dengan 1 (satu) indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sudah 2 tahun tidak dilakukan yakni tahun 2023 s.d 2024.

Tabel 11.
Target dan Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Dinas Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	%	62,55	0	Tidak dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kab, Kepulauan Selayar
Sumber : Hasil Penilaian PMPRB oleh Inspektorat Kab. Kepulauan Selayar, Tahun 2024				

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan indeks reformasi birokrasi Dinas Perikanan tahun 2024 tidak memiliki realisasi. Tidak adanya realisasi disebabkan oleh:

- a. Pendampingan dan evaluasi atas penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi yaitu Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ;
- b. Didalam Permenpan RB tersebut terdapat penajaman terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator, dimana Sasaran RB menjadi Sasaran RB General dan Sasaran RB Tematik. Hal inilah yang perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk dilakukan evaluasi atas capaian RB pada Perangkat Daerah;
- c. Belum ada Juknis/Juklak atas Evaluasi PMPRB Tahun 2024 yang dijadikan sebagai pedoman Evaluasi.

2. Tujuan (2) : Mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan (T-2)

Tujuan mengoptimalkan pengelolaan potensi diukur dengan 1 (satu) indikator yakni Nilai PDRB Subsektor Perikanan.

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah. Sehingga PDRB subsektor kelautan dan perikanan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah pada subsektor kelautan dan perikanan.

Berikut perbandingan antara target dan realisasi indikator Nilai PDRB subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 12.
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai PDRB Subsektor Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. M)	Nilai Rupiah	2.321,01	1.987.68	85,64	Tinggi
Sumber : Rilis Laporan BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024						

Tabel 13.
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor
Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024

Kontribusi Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Berdasarkan Harga Berlaku (Rp. 1000.000)					
Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kabupaten Kep. Selayar	6.392.741,35	6.835.395,93	7.480.469,86	7.986.244,54	8.340.513,51
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.712.877,07	2.913.584,80	3.268.730,34	3.504.833,63	3.595.166,14
Sub Sektor Perikanan	1.659.516,80	1.739.540,56	2.026.629,66	2.142.525,62	1.987.676,91

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 14.
Perbandingan Persentasi Distribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Nilai
PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020 - 2024

Distribusi PDRB Dasar Harga Berlaku (%)						
Uraian		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,44	42,62	43,70	43,89	43,10
A.3	Sub Sektor Perikanan	25,96	25,45	27,09	26,83	23,83

Dilihat dari uraian tabel PDRB tersebut di atas, maka pencapaian nilai indikator terhadap target PDRB subsektor perikanan tahun 2024 hanya mencapai 85,64 %. Nilai kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 43,10 %, dan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar cukup signifikan setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata sebesar 23,83 %. Pencapaian Nilai PDRB subsektor perikanan sebagai bagian dari indikator makro ekonomi didukung semua program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Perikanan tahun 2024.

Tabel 15.
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024

Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%)						
Uraian		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar		-1,78	4,02	3,67	3,68	3,33
A.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-7,12	3,27	2,62	3,26	1,38
A.3	Sub Sektor Perikanan	-11,32	3,51	5,59	4,49	1,64

Capaian kinerja PDRB subsektor perikanan tahun 2024 memiliki laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan 1,64 % dan mengalami perlambatan jika

dibandingkan tahun sebelumnya yakni 4,49%.

Upaya-upaya agar laju pertumbuhan tersebut lebih meningkat dan stabil dengan menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kegiatan penguatan sarpras produksi, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis yang merupakan capaian manfaat (*benefit*) dari tujuan dan sasaran tertinggi atas pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 2 (dua) sasaran, yakni :

1. Sasaran Strategis (SS_1) yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Dinas Perikanan;
2. Sasaran Strategis (SS_2) yaitu meningkatnya produksi perikanan.

Berikut ini analisis masing-masing Capaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan tahun 2023 :

- 1. Sasaran Strategis (1) :** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Dinas Perikanan (SS-1).

Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Dinas Perikanan diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yakni :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%);
2. Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan;

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

3. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Dinas Perikanan (%)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan dan pendorong bagi penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Perhitungan IKM suatu penyelenggara layanan publik didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 Nomor 14 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

IKM Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, merujuk pada Laporan Hasil Survei IKM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda yang bekerjasama dengan PPKP-

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

LPPM UNHAS. Dari laporan tersebut diketahui bahwa nilai IKM atas pelayanan Dinas Perikanan sebesar 80,24 % dari target IKM sebesar 77,05 % atau dapat dikatakan bahwa realisasi indikator IKM melebihi target indikator. Capaian kinerja Dinas Perikanan atas IKM ini berdasarkan indeks yang ditetapkan Permen PAN dan berada pada interval 76,61 – 88,30 atau dalam kategori “**Baik**”.

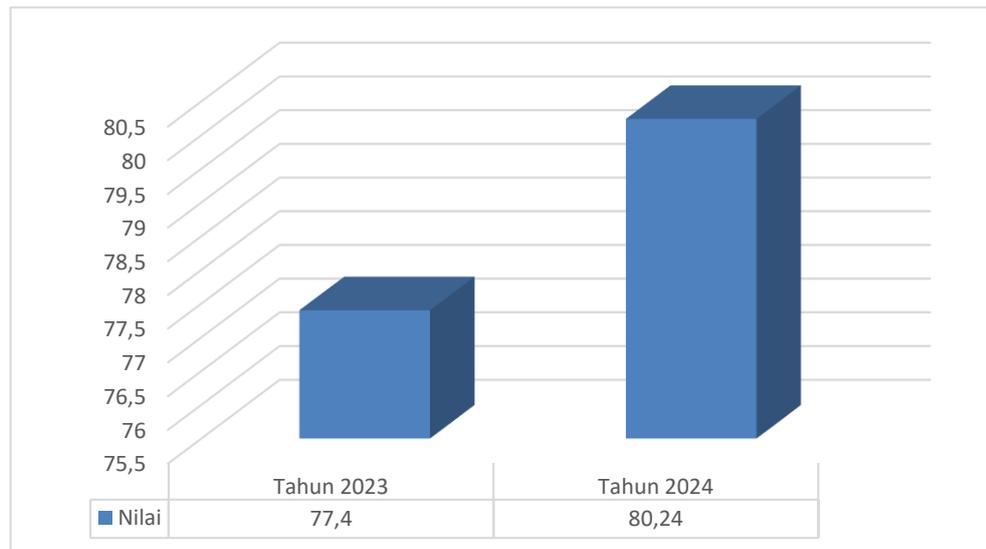
Tabel.16
Capaian Indikator pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,05	80,24	Rasio antara realisasi dan target : ≥ 100 % Tetapi berdasarkan Permen PANRB nilai tersebut berada dalam kategori Baik
Sumber : Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Kepulauan Selayar, Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024				

Jika realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 3,67%. Peningkatan ini tidak terlepas dari semakin baiknya layanan yang diberikan oleh Dinas terhadap masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

Gambar 03.
Diagram Perbandingan Antara Realisasi Indikator IKM
Tahun 2023 s.d 2024



Meskipun realisasi terhadap capaian kinerja telah melebihi target, masih terdapat beberapa layanan yang berpotensi untuk ditingkatkan layanannya. Unsur-unsur layanan tersebut anatar lain :

1. Persyaratan dan prosedur yakni dengan melakukan evaluasi terhadap persyaratan pelayanan dan berupaya untuk melakukan penyederhanaan persyaratan administrasi dan memperjelas setiap prosedur yang harus dilewati;
2. Aspek waktu penyelesaian dan produk spesifikasi jenis terhadap layanan yang dibutuhkan masyarakat;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas pelayan melalui pelatihan dan pengembangan;
4. Meningkatkan perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan;

Indikator 2 : Meningkatkan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Laporan ini didasarkan pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sementara penilaian kinerja didasarkan pada Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015.

Hasil Evaluasi dan penilaian atas LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2023 telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun 2024. Pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan berdasarkan hasil penilaian LAKIP Dinas Perikanan yang diuraikan secara periodik selama periode RENSTRA sampai Tahun 2026, diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17.
Target dan Capaian Indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan	%	67,11	71	Capaian Nilai LAKIP telah melebihi target Dan berdasarkan Permen PANRB nilai tersebut berada dalam interval > 70-80 dengan kategori BB
Sumber : Laporan Penilaian LAKIP DKP Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024				

Walaupun target telah dicapai, masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan pada :

1. Menyusun dokumen perjenjangan kinerja sesuai dengan format Cascading Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan memperhatikan faktor kunci atau Critical Succes Faktor (CSF) atas kinerja yang ingin dicapai;
2. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward

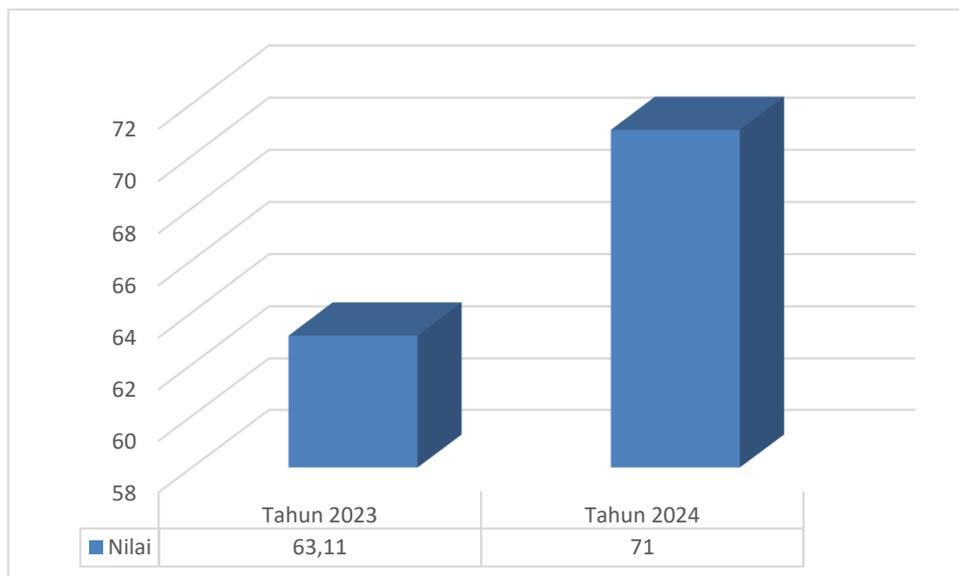
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

dan punishment;

3. Mempublikasi dokumen laporan kinerja secara tepat waktu melalui website Pemda/OPD atau media sosial lainnya;
4. Menyusun dokumen laporan kinerja yang memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan;
5. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan.

Realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perikanan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 12,50%. Peningkatan ini menandakan semakin baiknya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja Dinas Perikanan.

Gambar 04.
Diagram Perbandingan Antara Realisasi Indikator LAKIP
Tahun 2023 s.d 2024



**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Indikator 3 : Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 s.d 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tabel 18.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, Tahun 2024					

2. Sasaran Strategis (2) : Meningkatnya Produksi Perikanan (SS-2).

Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu :

1. Volume Produksi Perikanan (Ton)
2. Nilai Tukar.

Indikator 1 : Volume Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan jumlah produksi perikanan tangkap dengan produksi perikanan budidaya. Pengukuran produksi ini menggunakan metode pendataan statistik perikanan. Adapun Realisasi volume produksi

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

perikanan tahun 2024 sebesar 26.118,37 Ton atau 98,12 % dari target yang telah ditetapkan (tabel. 19).

Tabel 19.
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Volume Produksi Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Volume Produksi Perikanan	Ton	26.620,12	26.118,37	98,12	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024					

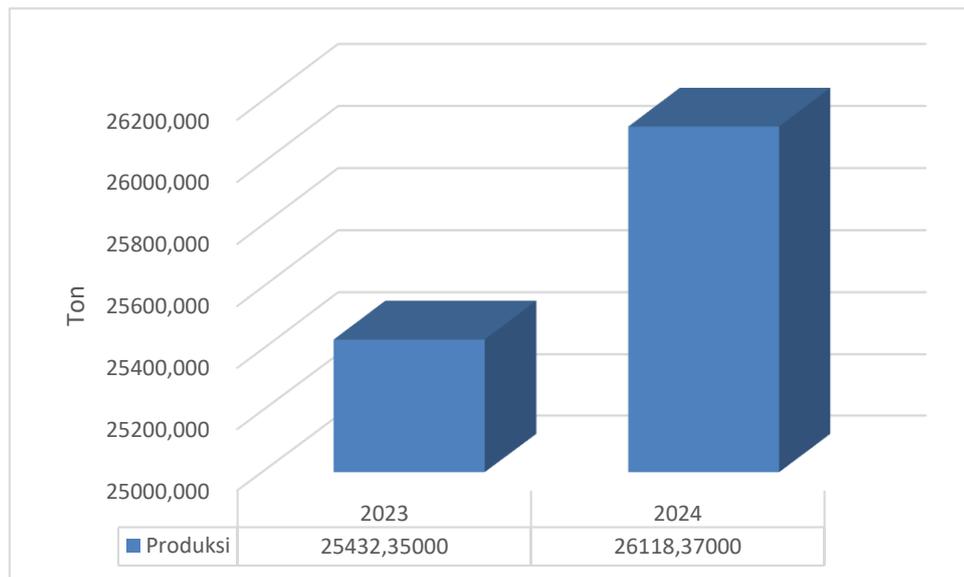
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi yakni :

1. Memaksimalkan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam kewenangan kabupaten/kota;
2. Memaksimalkan fungsi-fungsi pendaratan ikan dan rantai pasok pada sentra dan subsentra pendaratan yang ada melalui penyediaan sarana dan fasilitas pendaratan ikan;
3. Mendorong investasi dan memfasilitasi tata niaga dan rantai nilai produk- produk perikanan;
4. Melakukan revitalisasi lahan tambak;
5. Penyediaan sarana dan prasana bagi pelaku usaha perikanan

Jika dibandingkan produksi perikanan tahun 2023 terjadi peningkatan 0,03 % dari 25.432,34 Ton di tahun 2023 menjadi 26.118,37 Ton di tahun 2024.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Gambar. 05
Diagram Perbandingan Volume Produksi Perikanan
Tahun 2023 s.d 2024



Meningkatnya capaian indikator kinerja ini tidak lepas dari keberhasilan program pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Indikator 2 : Nilai Tukar

Indikator nilai tukar terdiri dari nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya, dan nilai tukar pengolah hasil perikanan. Nilai tukar adalah salah satu indikator kesejahteraan pelaku usaha perikanan yang diperoleh dari kemampuan tukar hasil produksi terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan rumah tangga (>100 = Surplus, <100 = Defisit).

Pada tahun 2024, realisasi nilai tukar nelayan dan pembudidaya menggunakan realisasi nilai tukar Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan realisasi nilai tukar pengolah hasil perikanan menggunakan Nilai Tukar Nasional. Hal ini disebabkan belum mampu OPD untuk melakukan pengukuran secara mandiri.

Berikut ini rinciannya realisasi indikator ini :

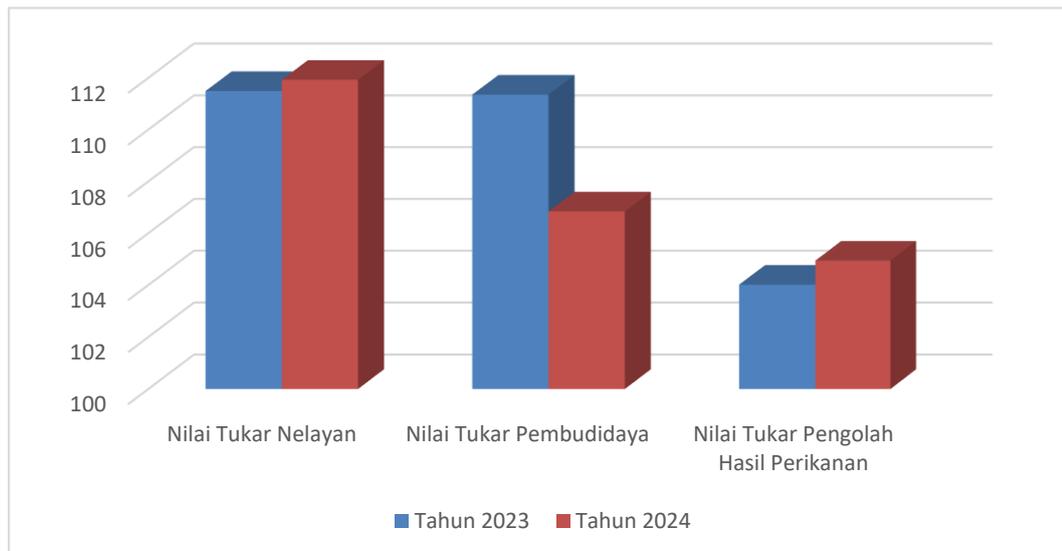
**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 20.
Target dan Capaian Kinerja Nilai Tukar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Nilai Tukar Nelayan		101,50	111,92	110,27	Sangat Tinggi
Nilai Tukar Pembudidaya		101,50	106,84	105,26	Sangat Tinggi
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan		101,56	104,94	103,33	Sangat Tinggi
Sumber : BPS provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 Dirjen PDSKP KKP tahun 2024					

Berdasarkan grafik dibawah menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai tukar pembudidaya jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan disebabkan menurunnya harga komoditas budidaya kerapu dan lobster. Hal inilah yang mempengaruhi produksi budidaya yang dibesarkan atau disimpan di keramba mengalami penurunan.

Gambar 06.
Diagram Perbandingan Antara Realisasi Nilai Tukar
Tahun 2023 s.d 2024



3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program merupakan capaian hasil (*outcome*) dari tujuan dan sasaran atas pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 5 (lima) sasaran yang didukung oleh 5 (lima) program Dinas. Berikut ini sasaran program beserta indikator kerjanya, serta dukungan program dinas :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S_10). Sasaran program ini memiliki 2 (dua) indikator yakni Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan. Sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota/Kabupaten;
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S_3). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Volume Produksi Perikanan Tangkap. Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ;
3. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S_4). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Volume Produksi Perikanan Budidaya. Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan (S_5). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Produksi Olahan Hasil Perikanan. Sasaran program ini didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ;
5. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU (S_6). Sasaran program ini memiliki 1 (satu) indikator yakni Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan. Sasaran ini, belum dilakukan pengukuran pada tahun 2022 karena tidak adanya anggaran yang

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

dialokasikan pada sasaran program tersebut. Sasaran ini didukung oleh Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Berikut analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Program Dinas Perikanan Tahun 2023 :

1. Sasaran Program (1) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Dinas Perikanan (S-10)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (S-10) sebagai salah satu sasaran kinerja Dinas Perikanan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran program ini merupakan pendukung utama (*learn and growth perspective*) organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dinas yang lainnya. Dalam rangka mencapai sasaran program tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yakni:

Indikator 1 : Persentasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Pencapaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas diukur dari pencapaian realisasi fisik Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perikanan. Capaian kinerja Dinas Perikanan per triwulan tahun 2024 disajikan pada grafik dibawah ini :

Tabel 21.
Capaian Persentasi Kinerja Dinas Perikanan
Pertriwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Capaian Kinerja Dinas Perikanan	15,46	17,01	10,46	54,08	97,01

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan
KabupatenKepulauan Selayar, Tahun 2024

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

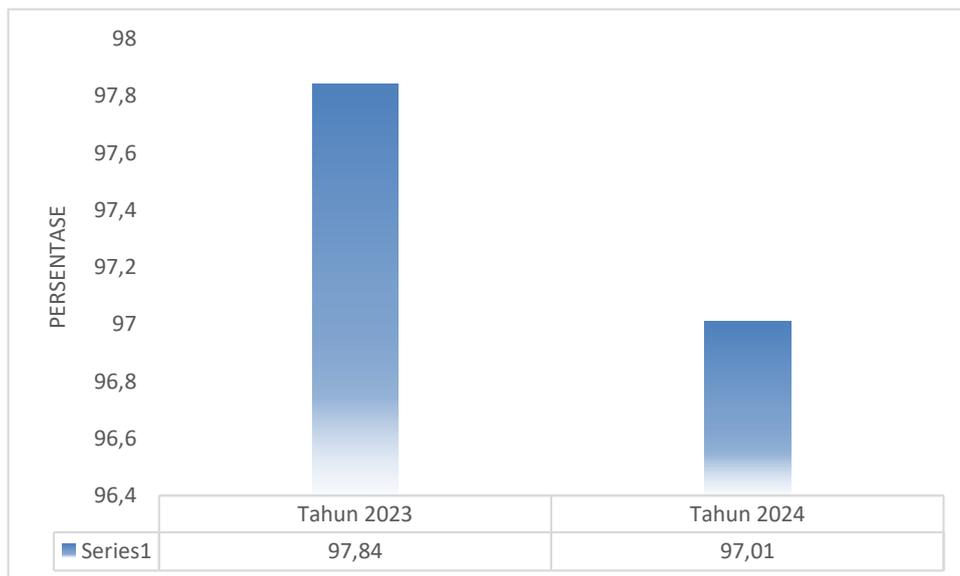
Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas menunjukkan setiap triwulan mengalami peningkatan, dimana capaian tertinggi terjadi di triwulan ke-4. Untuk pencapaian kinerja terhadap target capaian tahun 2024 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 22.
Target dan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Capaian Kinerja Dinas Perikanan	%	70,53	97,01	137,40	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024					

Capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika realisasi capaian kinerja ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar -0,85%.

Gambar. 07
Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 s.d 2024



Peningkatan capaian kinerja ini disebabkan oleh adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni pemeliharaan mesin dan alat lainnya berupa escavator dinas dan pemeliharaan website Dinas Perikanan.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Indikator 2 : Persentasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan

Indikator ke-2 pada Sasaran Program ini adalah Capaian Kinerja Keuangan. Kinerja keuangan didefinisikan sebagai tingkat capaian pengelolaan keuangan terhadap target yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan tingkat serapan belanja keuangan terhadap target pengelolaan belanja keuangan pada periode waktu tertentu. Indikator tingkat serapan belanja keuangan ini dapat digunakan sebagai salah satu instrument untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Capaian kinerja keuangan Dinas Perikanan pertriwulan tahun 2024 disajikan tabel dibawah :

Tabel 23.
Capaian Persentasi Kinerja Keuangan
Per Triwulan Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Capaian Kinerja Dinas Keuangan Perikanan	14,31	15,73	12,90	53,39	96,32
Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024					

Berdasarkan tabel capaian kinerja keuangan diatas menunjukkan setiap triwulan mengalami peningkatan, dimana capaian tertinggi terjadi di triwulan ke-4. Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perikanan tahun 2024 sebesar 96,32 % dari target 88 % atau 109,45 % dari target yang dtetapkan. Gambaran capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat tabel dibawah:

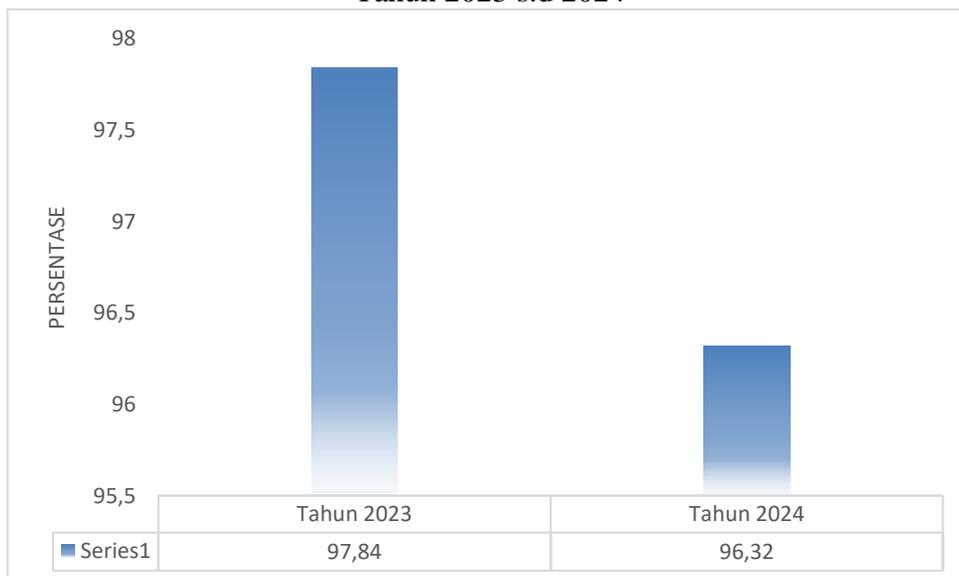
**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 24.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Keuangan
Dinas Perikanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perikanan	%	88	96,32	109,45	Sangat Tinggi
Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024					

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja keuangan dinas perikanan tahun 2023 dengan 2024 menunjukkan terjadi peningkatan sebesar -1,55 %. Peningkatan ini terjadi karena tidak terealisasi anggaran belanja dinas sesuai pagu yang telah diberikan seperti ATK yang disebabkan oleh harga satuan di DPA dengan ecatalog yang berbeda, belanja pemeliharaan yang tidak dilaksanakan.

Gambar.08
Capaian Indikator Kinerja Keuangan Dinas Perikanan
Tahun 2023 s.d 2024



**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Sasaran Program (2) : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (S-3)

Sasaran program meningkatnya produksi perikanan tangkap didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Pengukuran capaian kinerja sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yakni Volume Produksi Perikanan Tangkap. Produksi perikanan tangkap didefinisikan sebagai jumlah volume produksi perikanan hasil tangkapan yang didaratkan di tempat-tempat pendaratan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga estimasi produksi perikanan hanya ditujukan pada produksi perikanan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran indikator kinerja produksi perikanan tangkap dilakukan dengan metode statistik perikanan dengan teknik sampling yakni melakukan perhitungan produksi perikanan melalui desa sampel yang dipilih secara sengaja melalui kerangka survei. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas statistik Dinas Perikanan. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2024 dan analisa perbandingan antara target dan realisasi capaian berdasarkan indikator kinerja disajikan pada tabel di bawah ini secara berturut-turut.

Tabel 25.
Data Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan Triwulan Tahun 2024

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.812,5	6.157,7	7.826,4	7.813,8	25.610,4

Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, Tahun 2024

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada triwulan ke-3 kemudian disusul triwulan ke-4 dan triwulan ke-2, sementara produksi terendah berada pada triwulan ke-1. Capaian terhadap target produksi perikanan tangkap tahun 2024 dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 26.
Target dan Capaian Indikator Kinerja
Volume Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
1.	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.480,87	25.610,4	100,5	Sangat tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, Tahun 2024						

Tabel diatas menunjukkan capaian realisasi volume produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 25.610,4 ton atau melampaui jumlah yang ditargetkan sebesar 100,5 %. Capaian realisasi kinerja produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Lamanya musim teduh (timur) sehingga menambah panjang waktu dan trip penangkapan ikan;
2. Meningkatnya penggunaan alat penangkapan ikan seperti waring, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, rawai, pukat, dan pancing serta dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan seperti lampu dan rumpon;
3. Meningkatnya kepemilikan prasarana penangkapan dengan kondisi yang lebih baik seperti motorisasi armada yang dapat melakukan penangkapan yang relatif jauh dari pantai;
4. Meningkatnya pengetahuan nelayan dalam pemanfaatan teknologi penangkapan ikan seperti aplikasi peta, GPS, dan fishfinder.

Korelasi capaian kinerja produksi perikanan tangkap dengan intervensi

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

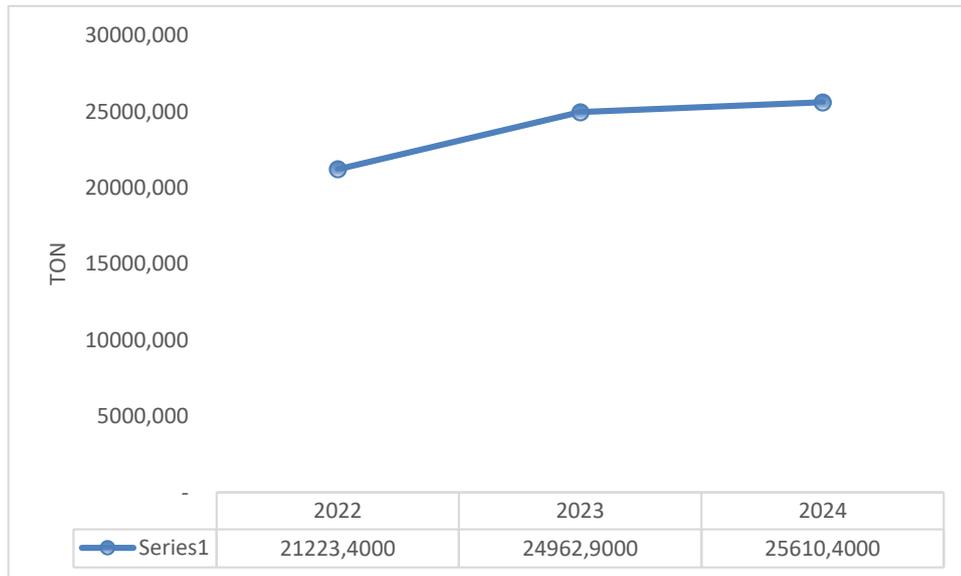
kegiatan berdasarkan tupoksi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI Dinas Perikanan dapat tergambarkan pada fasilitasi pemberian bantuan alat tangkap dan sarana penangkapan ikan serta fasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil yang telah diimplementasikan sejak lama. Meskipun demikian korelasi kinerja peningkatan produksi tangkap dengan ketersediaan sarana dan alat tangkap ikan tetap memiliki faktor pembatas seperti ketersediaan BBM, keterbukaan pasar regional dan local, musim tangkap, dan daya dukung lingkungan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah :

1. Pendampingan untuk nelayan, penguatan sarana dan prasarana produksi, fasilitasi akses pasar, dan peningkatan kapasitas nelayan;
2. Pengembangan dan penguatan kelembagaan nelayan dan kemitraan usaha.
3. Peningkatan layanan terhadap akses BBM, dokumen kapal, dan perizinan usaha penangkapan ikan.
4. Penguatan sentra-sentra produksi melalui pengadaan berbagai fasilitas kebutuhan nelayan, fasilitas rantai dingin dan mutu hasil tangkapan;
5. Restocking sumberdaya perikanan dan pencegahan/penurunan praktek penangkapan ikan secara *illegal* dan *destructive*.

Produksi perikanan tangkap selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 – 2024 disajikan pada grafik dibawah:

Gambar 09.
Diagram Perbandingan Realisasi Indikator
Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap yang terjadi dari tahun 2022 – 2024 disebabkan antara lain :

1. Kondisi pasar cukup baik yang mendorong upaya penangkapan ikan secara maksimal;
2. Keberhasilan program/kegiatan/sub kegiatan yang selama ini (tahun 2022-2024) dilaksanakan untuk meningkatkan produksi tersebut yakni pemberian bantuan sarpras, penguatan kelembagaan, fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha, pemberian pelatihan alat tangkap ramah lingkungan.

3. Sasaran Program (3) : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (S-4)

Dalam rangka mencapai sasaran program ini yang didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan menjabarkanyadalam 1 (satu) indicator kinerja yakni Volume Produksi Perikanan Budidaya. Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah volume produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh pelaku usaha pembudidaya di wilayah Kabupaten

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Kepulauan Selayar, baik produksi budidaya laut (rumput laut dan ikan hidup), budidaya air tawar (Ikan lele dan nila), dan budidaya air payau (udang dan ikan bandeng). Jumlah produksi budidaya berdasarkan data triwulan tahun 2024, dan pengukuran capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 27.
Data Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	111,22	166,13	152,19	78,42	507,97
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024					

Tabel 28.
Target dan Capaian
Indikator Kinerja Volume Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.054,86	507,97	44,50	Rendah
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024					

Capaian produksi bidang budidaya pada tahun 2024 ini juga belum memenuhi target. Jika dipersentasekan, realisasi produksi budidaya baru sekitar 44,59% dari target yang ditetapkan yaitu 1.139,25 ton. Hal ini disebabkan atau masih dipengaruhi oleh :

1. Parahnya kerusakan yang ditimbulkan oleh El-Nino (menurut versi pembudidaya rumput laut “air laut sangat panas”) pada tahun 2023, yang menyebabkan masih sulitnya pembudidaya bangkit di tahun 2024.
2. Penyakit Berak Putih (White Spot) pada udang yang menyebabkan hasil panen tidak maksimal;

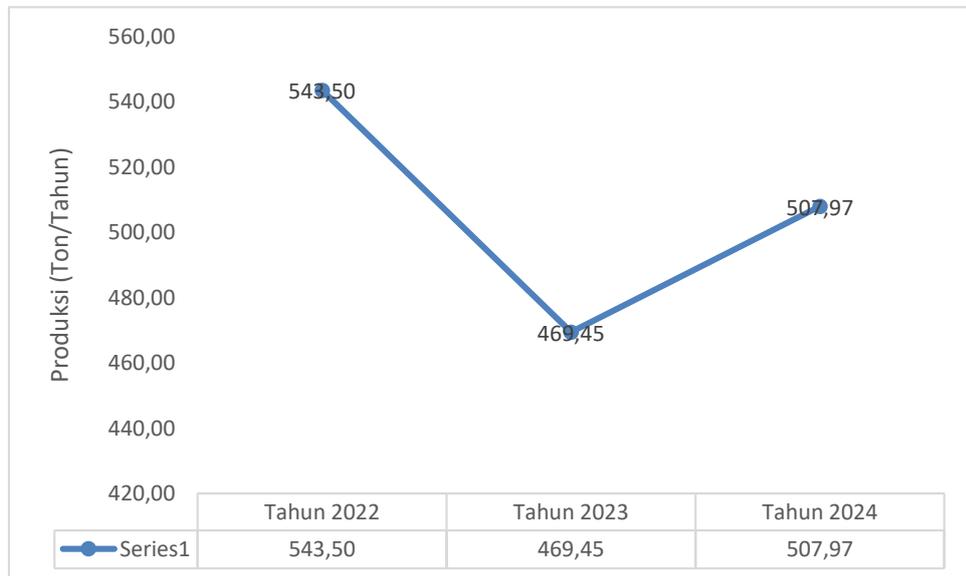
**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

3. Ekstensifikasi lahan sangat mendesak untuk dilakukan mengingat lebih dari 50% dari potensi lahan budidaya untuk vaname, windu dan bandeng masuk dalam kategori non produktif.

4. Lahan-lahan tambak yang tidak terkelola;

Jika realisasi produksi perikanan budidaya dilihat selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2022 s.d 2024 menunjukkan terjadi peningkatan pada tahun 2024 dan mengalami penurunan pada tahun 2023.

Gambar 10
Diagram Perbandingan Realisasi Indikator
Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan produksi budidaya pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 lalu, komoditas budidaya andalan seperti rumput laut, udang vaname, windu dan ikan bandeng meningkat, walaupun tidak signifikan, bahkan tidak mampu melewati produksi pada tahun 2022. Hal itu disebabkan karena parahnya kerusakan yang ditimbulkan oleh El-Nino pada tahun 2023, yang menyebabkan sulit bangkit di tahun 2024.

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

Komoditas kedua yang menjadi penentu peningkatan produksi budidaya adalah Udang Vaname. Secara umum, produksi vaname selalu menempati urutan kedua dalam hal besaran produksi setiap tahunnya, sehingga sangat berperan dalam naik turunnya produksi total budidaya. Pada tahun 2024 ini, produksi vaname adalah 50,17 ton. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2023 meski tidak signifikan. Namun belum mampu menyamai produksi tahun 2022 yang mencapai 73,21 ton. Hal ini disebabkan oleh budidaya semi intensif dan intensif yang belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari penyakit Berak Putih (*White Spot*) yang menyebabkan hasil panen tidak maksimal, bahkan satu dari dua pembudidaya intensif harus istirahat pada kuartal III dan IV karena hasil yang belum sesuai dengan harapan.

Produksi budidaya ikan bandeng merupakan terbesar ketiga dalam menyumbang produksi budidaya. Meski mengalami peningkatan produksi dibanding tahun 2023 lalu, akan tetapi belum signifikan mengangkat produksi secara umum. Keluhan akan panasnya air tambak masih diungkapkan oleh pembudidaya yang menyebabkan ikan bandeng tidak bisa tumbuh dengan baik. Pertumbuhan bandeng yang terganggu menyebabkan ikan tidak membesar dan masa pemeliharaan menjadi lebih lama dari biasanya, bobot ikan juga mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas udang windu.

Budidaya air tawar dengan komoditas ikan nila dan lele mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Meski penurunan produksi budidaya air tawar bisa diabaikan karena hanya sedikit sekali pengaruhnya terhadap kenaikan total produksi budidaya, akan tetapi budidaya air tawar ke depan tetap harus dipikirkan pengembangannya sebagai alternative lain sumber protein ikan untuk menunjang ketahanan pangan. Permasalahan terbesar budidaya air tawar masih berkuat pada

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

persoalan budaya masyarakat yang masih lebih suka mengkonsumsi ikan laut. Sedangkan untuk pengelolaan budidaya air tawar masih sangat tergantung dengan bantuan hibah dari OPD terkait yaitu Dinas Perikanan. Kalaupun ada yang melakukan budidaya secara swadaya, itu hanya sebagai hobby dan hiburan saja.

Untuk budidaya laut dengan keramba, baik KJA maupun Tancap juga mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh turunya minat untuk melakukan penangkapan kerapu (*baby atau babybaby*). Sebagaimana diketahui bahwa untuk komoditas kerapu, bibitnya (*baby, babybaby, atau kerapu yang ditampung dalam jangka lama*) diperoleh dari alam melalui penangkapan, tentu saja produksinya juga sangat tergantung dari hasil pencarian di alam. Informasi dari pembudidaya mengatakan bahwa harga komoditas kerapu pernah turun pada kuartal II dan III.

Untuk budidaya lobster memiliki persoalan yang sama dengan kerapau, yaitu harga yang anjlok. Pada kuartal I dan II harga lobster mengalami penurunan harga yang ekstrim bahkan tidak ada pembeli. Hal inilah yang mempengaruhi produksi budidaya yang dibesarkan atau disimpan di keramba mengalami penurunan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah :

1. Mencari dan uji coba jenis rumput laut yang lebih tahan terhadap perubahan kondisi perairan;
2. Melakukan pendampingan terhadap kelompok pembudidaya secara lebih intens;
3. Penyediaan sarpras budidaya;
2. Penyediaan kebun bibit rumput laut sehingga bibit dapat tersedia sepanjang tahun;

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

3. Peningkatan SDM kelembagaan pembudidaya
4. Ekstensifikasi lahan budidaya untuk vaname, windu dan bandeng;
5. Rehabilitasi lahan-lahan tambak yang tidak terkelola sehingga dapat beroperasi kembali;
6. Fasilitasi akses pasar

Meningkatnya produksi budidaya tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, tidak lepas dari keberhasilan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perikanan yang telah dilakukan beberapa tahun ini yakni pendampingan kelompok dan penyediaan sarpras.

Sasaran Program (4) : Meningkatkan Produk Olahan Hasil Perikanan (S-5)

Sasaran program meningkatnya produk olahan hasil perikanan (S-5) didukung oleh 1 (satu) layanan program yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini dilihat dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni volume produksi olahan hasil perikanan. Pengukuran indikator kinerja dilakukan melalui metode dan teknik pendataan oleh Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan.

Tabel 29.
Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan
Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pengukuran
Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	231,34	247,99	107,20	Sangat tinggi
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Perikanan, Tahun 2024					

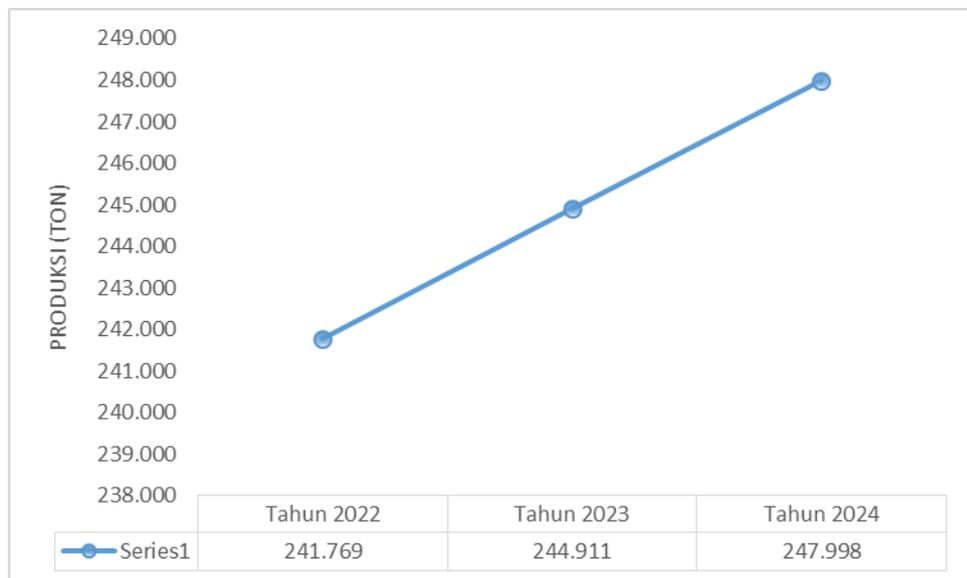
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diketahui bahwa jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2024 yaitu 247,99 ton dari target 231,94 ton. Jika dipersentasekan, realisasi produksi produk olahan hasil perikanan sudah

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

mencapai 107,20%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) pada bidang pengolahan khususnya Unit Pengolahan Ikan. Pada tahun 2024 jumlah Unit Pengolahan Ikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 156 UPI yang terdiri dari 5 RTP untuk jenis olahan fermentasi dan peragian (produk berupa terasi udang), 8 RTP untuk pelumatan daging dan surimi (produk bakso ikan) dan 138 RTP untuk penggaraman dan pengeringan (produk ikan kering) serta 5 RTP untuk jenis pengolahan lainnya (produk berupa abon ikan). Peningkatan jumlah RTP yang signifikan ini berpengaruh atau berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah produksi produk olahan hasil perikanan.

Jika dibandingkan capaian indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan tahun 2024 dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 1,26% (lihat gambar).

Gambar 11.
Diagram Perbandingan antara Realisasi Indikator
Volumen Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2022-2024



Meskipun realisasi mencapai target, diperlukan upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sasaran program melalui :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

- a. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil perikanan.
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha pada aspek pengolahan dan pasar.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung produksi pengolahan.
- d. Meningkatkan kualitas produk olahan dan akses pasar.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan produksi yakni meningkatnya kualitas SDM pengolah hasil perikanan yang telah mendapatkan pengetahuan melalui bimbingan teknis yang rutin dilakukan, penyiapan sistem rantai dingin, dan pemberian sarana/prasarana pengolahan ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

5. Sasaran Program (5) : Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU (S-6)

Sasaran program ini didukung oleh layanan pada program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan berada di bawah tugas pokok Bidang Perikanan Budidaya. Pengukuran kinerja capaian sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dalam Kabupaten/Kota Terhadap Perundang-undangan (%) dengan formulasi rasio jumlah pembudidaya yang telah mengikuti ketentuan perundang-undangan terhadap total pembudidaya ikan dalam kabupaten/kota.

Persentase ketaatan usaha perikanan budidaya yaitu rasio jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang memiliki izin terhadap jumlah RTP Budidaya Air Payau/Tawar Kabupaten. Dalam lingkup indikator ini, jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya yaitu sebanyak 336 dengan target RTP yang diawasi yaitu 10,56% atau sebanyak 36 RTP dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Pada tahun 2024 ini, terdapat 18 RTP yang diawasi dimana 2 RTP yang belum berhasil dibuatkan izin usaha karena persoalan berkas administrasi yang masih bermasalah. Jika melihat capaian pengawasan jumlah RTP pada tahun 2024, maka total RTP yang telah diawasi dalam kurun waktu 2023-2024 yaitu sebesar 54 RTP atau 15,84%. Berhasilnya pencapaian target ini disebabkan oleh domisili yang disasar pada tahun 2024 pada umumnya berdekatan, terutama di daerah kepulauan. Hal ini menyebabkan anggaran dan waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien.

Tabel 30.
Capaian Indikator Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan	%	15,81%	15,84%	100
Sumber : Laporan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Tahun 2024				

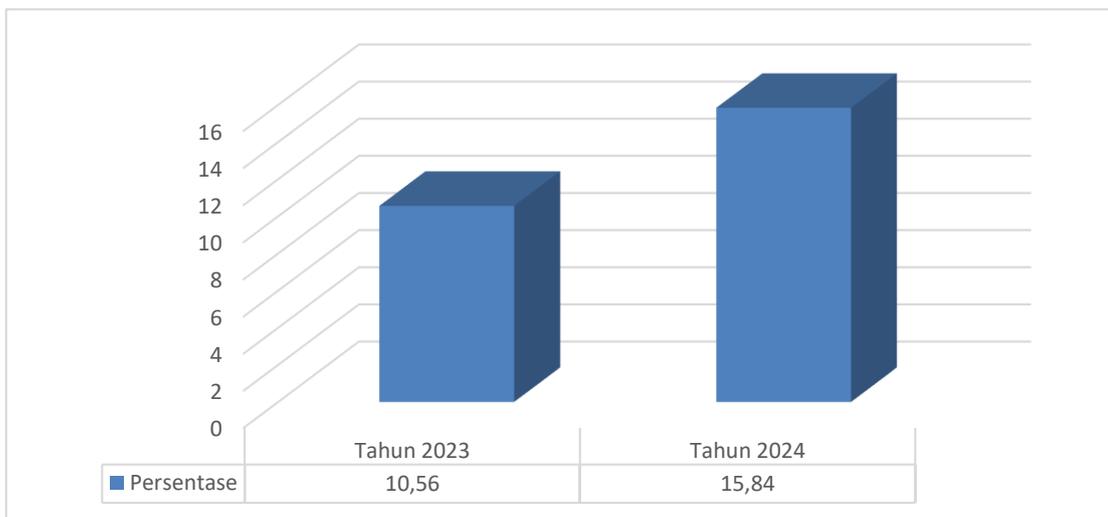
Walaupun capaian indikator ini telah melebihi dari target yang telah ditentukan, perlu dilakukan beberapa hal untuk lebih meningkatkan capaian kinerja yakni :

1. Menganggarkan kegiatan pengawasan secara rutin agar dapat dianalisa perkembangan ketaatan pelaku usaha pertahunnya;
2. Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya ketaatan pelaku usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pentingnya memiliki izin usaha, dan cara budidaya yang baik;
3. Membantu pembudidaya dalam melakukan penyediaan berkas yang dibutuhkan untuk IUP.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan sebesar 50 % (gambar 12). peningkatan dan keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari keberhasilan program/kegiatan/sub kegiatan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gambar. 12
Diagram Perbandingan Capaian Indikator Persentase Ketaatan Usaha Perikanan Budidaya dlm Kabupaten /Kota Terhadap Perundang-undangan Tahun 2023 s.d 2024



**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

3.3 REALISASI KEUANGAN

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya indikator dalam capaian kinerja adalah keuangan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan jika didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari anggaran APBD (DAU).

Dalam mengimplementasi rencana strategis tahun 2021 - 2026 untuk tahun 2024 dialokasikan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.182.100.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.179.200.000,- dengan cakupan pelaksanaan 17 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dalam 5 program. Berikut ini tabel realisasi belanja APBD :

Tabel 31.
Realisasi Belanja APBD Dinas Perikanan Tahun 2024

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.182.100.000	3.080.689.403	96,81
2.	Belanja Langsung	4.179.200.709	4.009.842.535	95,95
Total Belanja		7.361.300.000	7.090.531.938	96,32

Realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program dinas untuk mendukung capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

Tabel 32.
Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	Realisasi (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.194.894.800	3.974.987.603	94,76
A.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.686.600	83.627.100	97,60
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.364.000	36.667.800	98,14
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.522.100	1.302.000	85,54
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.164.400	1.917.000	88,57
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.512.900	1.247.000	82,42
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.198.000	1.089.000	90,90
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.695.800	2.418.900	89,73
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.229.400	38.985.400	99,38
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.194.010.800	3.091.389.803	96,79
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.182.100.000	3.080.689.403	96,81
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.746.000	7.656.000	98,84
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.650.000	1.738.300	65,60
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000	362.100	72,42
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1.014.800	944.000	93,02
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.876.000	21.876.000	100
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.876.000	21.876.000	100

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.264.300	281.260.100	100
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	499.900	499.900	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000	500.000	100
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.400	2.999.400	100
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.265.000	277.260.800	100
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.000.000	38.400.000	98,46
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.000.000	38.400.000	98,46
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.431.600	376.364.100	99,98
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.922.800	102.855.300	99,93
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.508.800	273.508.800	100
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.625.500	82.070.500	41,74
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.130.000	39.830.000	96,84
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.855.500	28.031.500	62,49
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.640.000	14.209.000	12,84

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.432.147.300	1.392.480.238	97,23
A.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	39.259.800	39.036.400	99,43
1.	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	39.259.800	39.036.400	99,43
B.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.367.587.500	1.329.967.338	97,25
1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.233.245.100	1.195.852.838	96,97
2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	18.393.900	18.177.000	98,82
3.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	115.948.500	115.937.500	99,99
B.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	25.300.000	23.476.500	92,79
1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	25.300.000	23.476.500	92,79
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	176.600.200	175.148.597	99,18
A.	Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil	21.310.000	21.070.200	98,87
1.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan Informasi	21.310.000	21.070.200	98,87

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

C.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	150.015.200	148.923.397	99,27
1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.695.200	30.070.500	97,96
2.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.320.000	99.068.597	99,75
3.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.838.700	3.746.500	97,60
4.	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatn air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	16.161.300	16.037.800	99,24
D.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.275.000	5.155.000	97,73
1.	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahnya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.	5.275.000	5.155.000	97,73
IV.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.725.000	2.668.000	97,91
A.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	2.725.000	2.668.000	97,91
1.	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.725.000	2.668.000	97,91

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

V.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.554.932.700	1.545.643.300	99,40
A.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	22.952.700	22.525.800	98,14
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelohan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah / Kabupaten	22.952.700	22.525.800	98,14
B.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	7.450.000	7.036.000	94,44
1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	7.450.000	7.036.000	94,44
B.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.524.530.000	1.516.081.500	99,45
1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.515.910.000	1.507.519.500	99,45
2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	8.620.000	8.562.000	99,33

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari anggaran belanja langsung Dinas Perikanan tahun 2024 sebesar Rp. 4.179.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.090.531.938,- atau sebesar 96,32 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan ini adalah perwujudan dari sistem akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2024, mulai perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran kinerja, transparansi, koordinasi, dan pelaporan. Laporan ini telah menguraikan capaian kinerja melalui pengukuran indikator pada masing-masing sasaran kinerja. Demikian pula rencana tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, belum sepenuhnya berhasil memenuhi target yang telah direncanakan dan diharapkan. Adapun sasaran kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 yang telah mencapai keberhasilan berdasarkan indikator-indikator kinerja adalah :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan sebesar 0 % dari target 58,75%,.
2. Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp M) dengan capaian 85,64 % yaitu 1.987,68 dari target sebesar 2.321,01.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perikanan sebesar 80,24 % telah melebihi target dengan indeks kategori “Baik”.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perikanan sebesar 71 %, dengan indeks kategori “BB” (Sangat Baik).
5. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Berdasarkan SAP, dengan kategori sudah “Sesuai”

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

6. Produksi Perikanan dengan capaian 98,12 %, yaitu 26.118,37 ton dari target sebesar 26.620,12 ton.
7. Nilai Tukar :
 - a. Nilai Tukar Nelayan dengan capaian 110,27 %, yaitu 111,92 dari target sebesar 101,50;
 - b. Nilai Tukar Pembudidaya dengan capaian 105,26 % yaitu 106,84 dari target sebesar 101,50;
 - c. Nilai Tukar Pengolah dengan capaian 103,33 yaitu 104,94 dari target sebesar 101,56.
8. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, dengan capaian sebesar 100,51 %, yaitu sebesar 25.610,40 ton dari target sebesar 25.480,87 ton.
9. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, dengan capaian sebesar 44,59% yaitu sebesar 507,97 ton dari target sebesar 1.139,25 ton.
10. Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan, dengan capaian sebesar 107,20 % yaitu sebesar 247,99 ton dari target sebesar 231,34 ton.
11. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Peraturan Per-UU, dengan capaian 100,19 % dari target 18 RTP atau 15,84 % dari total RTP pembudidaya ikan dalam daerah kabupaten.

Pencapaian target beberapa indikator sasaran tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan terutama masyarakat sebagai pelaku utama dan subyek pembangunan. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian, juga terdapat kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan ke depan, antara lain :

Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

1. Masih rendahnya produktifitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya, yang didominasi dan dicirikan oleh usaha kecil dan mikro;
2. Masih rendahnya keberdayaan pelaku usaha perikanan (pendidikan, sarana, keterampilan, kelembagaan, teknologi, akses pasar, dan akses permodalan);
3. Masih tingginya kegiatan transaksi ikan di atas kapal (transshipment) dan belum maksimalnya ketersediaan sarana dan fasilitas pendaratan pada sentra dan subsentra pendaratan yang ada.

4.2 Tindak Lanjut

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perikanan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berbagai permasalahan atau kendala diupayakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target tahun berikutnya adalah :

1. Mendorong peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, maupun evaluasi kinerja;
2. Menetapkan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pencapaian kinerja sasaran strategis, baik tata kelola organisasi maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan.

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**

3. Mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai agar terlibat dalam menyusun perencanaan kinerja hingga pengukuran kinerja;
4. Mendorong perbaikan tata niaga dan pemasaran hasil perikanan;
5. Mendorong pertumbuhan investasi dan industrialisasi sektor kelautan dan perikanan.

Benteng, Maret 2025



KEPALA DINAS

ANDRIANY GUSRAM, S.Pi

NIP. 19810825 201001 2 029

Pangkat : Pembina

**Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024**